

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No. 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna)

Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing – masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik Pencucian Uang termasuk dengan cara melakukan kerjasama internasional, baik melalui forum bilateral maupun multilateral. Dalam konteks kepentingan Nasional ditetapkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan penegasan dalam penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Aceh dan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka ditentukan rumusan masalah, Bagaimana Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian uang di Kepolisian Daerah Aceh, Apakah hambatan dalam proses penyidikan Pencucian Uang di Kepolisian Daerah Aceh dan bagaimana solusinya?, Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Putusan No. 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field Research*), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Lebih jelasnya, sumber data primer dan sekunder, yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan.

Bahwa pihak-pihak terkait terutama penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencucian uang diharapkan mampu menjalin koordinasi antar instansi penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK, PPATK dan Hakim) sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, serta menjaga integritas, profesional, jujur dan adil, terutama hakim yang dituntut harus mempunyai sifat visioner mengingat pembuktian tindak pidana pencucian uang ini sangat sulit karena harus membuktikan dua atau lebih tindak pidana sekaligus.

Kata Kunci : Kejahatan, Tindak Pidana Korupsi, *Money Laundering*,

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING (CASE STUDY OF STATE COURT DECISION No. 59/Pid.Sus- TPK/2019/PN Bna)

Various efforts have been taken by each country to prevent and eradicate the practice of money laundering, including by conducting international cooperation, both through bilateral and multilateral forums. In the context of the national interest, Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering was established, as an affirmation in the investigation conducted by the Aceh Regional Police and the Decision by the Panel of Judges of the Banda Aceh District Court No. 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna.

Based on the background of the problems above, the formulation of the problem is determined, How is the Implementation of the Case Handling of Money Laundering Crimes at the Aceh Regional Police, What are the obstacles in the process of investigating Money Laundering at the Aceh Regional Police and what are the solutions?, What are the considerations of the Panel of Judges of the Banda Aceh District Court towards case of the Crime of Money Laundering based on Decision No. 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna.

Sources of data in this study consisted of primary and secondary data. Primary data is data obtained from field research results (field research), while secondary data is data obtained from library research results (Library Research). More specifically, primary and secondary data sources, obtained from field research and literature.

It is hoped that related parties, especially law enforcers, in resolving cases of money laundering crimes are expected to be able to establish coordination between law enforcement agencies (Police, Prosecutors, KPK, PPATK and Judges) in accordance with their respective duties and authorities, as well as maintain integrity, professionalism, honesty and fair, especially the judge being prosecuted must have a visionary nature considering that proving money laundering is very difficult because you have to prove two or more crime s at once.

Keywords: Crime, Corruption, Money Laundering,